



T.A. 2022

**Catatan atas  
Laporan  
Keuangan  
Kantor Wilayah  
Kementerian  
Hukum dan HAM  
Jawa Barat  
(408735)**



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA BARAT  
2022**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (013.09 DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA) adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandung, 17 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah



**R. Andika Dwi Prasetya**

NIP. 196712171991031002

## DAFTAR ISI

Hal	
Kata Pengantar	1
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	10
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.3. Basis Akuntansi	11
A.4. Dasar Pengukuran	11
A.5. Kebijakan Akuntansi	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
B.1. Pendapatan	16
B.2. Belanja	16
B.3. Belanja Pegawai	17
B.4. Belanja Barang	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	18
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	18
C.2. Piutang Bukan Pajak	18
C.3. Belanja Dibayar di Muka	18
C.4. Persediaan	18
C.5. Uang Muka Dari KPPN	18
C.6. Pendapatan Diterima di Muka	18
C.7. Ekuitas	18
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	19
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	19
D.2. Beban Pegawai	19
D.3. Beban Persediaan	19
D.4. Beban Jasa	19
D.5. Beban Pemeliharaan	19
D.6. Beban Perjalanan Dinas	19
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	20
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	20
D.9. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	20
D.10. Defisit Pos Luar Biasa	20
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	21
E.1. Ekuitas Awal	21
E.2. Surplus (Defisit) LO	21
E.3. Koreksi Penyesuaian Tahun Berjalan	21
E.4. Koreksi Nilai Persediaan	21
E.5. Koreksi Tetap Aset	21
E.5. Koreksi Tetap Aset	21
E.6. Transaksi Antar Entitas	21
E.7. Ekuitas Akhir	21

F. Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya	22
F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	22
F.2 Pengungkapan Lain-lain	22
F.3 Temuan dan Tindak Lanjut BPK	22

**Laporan-Laporan Pendukung**

Neraca Percobaan	
Laporan Operasional	
Laporan Perubahan Ekuitas	
Neraca	
Laporan Realisasi Anggaran	
Laporan Realisasi Anggaran Belanja	
Laporan Realisasi Pengembalian Belanja	
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah	
Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah	

**Lampiran / Data Dukung**

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (013.09 DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA) yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan **Tahun Anggaran 2022**. Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung, 17 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah



**R. Andika Dwi Prasetya**

NIP. 196712171991031002

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (013.09 DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA) Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari 2022 dan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 0,-** atau sebesar **0%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 0,-**

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 255.296.870,-** atau mencapai **98,49%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 259.206.000,-** .

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Tahun Anggaran 2022.

Nilai Aset Tahun Anggaran 2022 dicatat dan disajikan sebesar **Rp. 0,-** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp. 0,-**, Aset Tetap sebesar **Rp. 0,-** dan Aset Lainnya (Neto) sebesar **Rp. 0,-**

Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar **Rp. 0,-** yang berupa kewajiban sebesar **Rp. 0,-** dan Ekuitas sebesar **Rp. 0,-**

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 0,-** sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp 255.296.870,-** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp. (255.296.870),-**. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp. (255.296.870),-**.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal adalah sebesar **Rp. 0,-** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp. (255.296.870),-** kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan **Rp. 0,-** serta ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp. 255.296.870,-** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal, 31 Desember 2022 adalah senilai **Rp. 0,-**

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

JAWA BARAT (DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Per 31 Desember 2022		% thd Angg	31-Dec-21
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0.00	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-	<b>0.00</b>	-
<b>BELANJA</b>	B.2.				
<b>Belanja Operasional</b>					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0.00	-
Belanja Barang	B.4	259,206,000	255,296,870	98.49	266,088,869
Belanja Modal	B.5	-	-	0.00	-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>259,206,000</b>	<b>255,296,870</b>	<b>98.49</b>	<b>266,088,869</b>
<b>Belanja Modal</b>					
Belanja Tanah	B.6	-	-	0.00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	-	-	0.00	-
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	0.00	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	0.00	-
Belanja Modal Lainnya	B.10	-	-	0.00	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>259,206,000</b>	<b>255,296,870</b>	<b>98.49</b>	<b>266,088,869</b>

## II. NERACA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
JAWA BARAT (DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA)  
NERACA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021**

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-22	31-Dec-21
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		-	-
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.13	-	-
Peralatan dan Mesin	C.14	-	-
Gedung dan Bangunan	C.15	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.17	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	-	-
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		-	-
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	-	-
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		-	-
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.25	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		-	-
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.26	-	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		-	-



### III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
JAWA BARAT (DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA)  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-22	31-Dec-21
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	127,499,000	132,810,000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	127,797,870	133,278,869
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>255,296,870</b>	<b>266,088,869</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(255,296,870)</b>	<b>(266,088,869)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.12		
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		-	-
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.13		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(255,296,870)</b>	<b>(266,088,869)</b>

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
JAWA BARAT (DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA)  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31-Dec-22	31-Dec-21
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(255,296,870)	(266,088,869)
<b>PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN</b>	E.3	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
PENYESUAIAN NILAI KEWAJIBAN		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.4	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	255,296,870	209,044,750
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	-	-
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.7	-	-

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 31 Desember 2021-2022 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkumham adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 31 Desember 2021 – 2022.

(Lampiran matrik Renstra Kinerja dan Pendanaan terlampir)

#### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA). Laporan ini dihasilkan melalui sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah system yang menghasilkan informasi Aset Tetap, Persediaan, Lainnya untuk penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara serta Laporan Manajerial Lainnya. dan Aset

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA) adalah 1 (satu) satuan kerja. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 1 satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

#### Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	0200	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA)	-	1	-	-	1
Jumlah			-	1	-	-	1

### A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA) adalah sebagai berikut :

#### 1. Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## 2. Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan  
*(\*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)*

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## 3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

### Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

### 6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### - Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

### 7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

### 8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama	10%

Lancar	tidak dilakukan pelunasan	
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara / DJKN	100%

#### 9. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

- Tanah
- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### 10. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2017 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per, 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan 31 Desember 2021.



## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (013.09 Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia) melaksanakan kegiatan berdasarkan pagu anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-013.09.2.408735/2022 tanggal 17 November 2021. Satker 408735 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tidak terdapat perubahan DIPA. Sehingga berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja untuk DIPA 408735 bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

### Rincian Anggaran Tahun 2022

Uraian	2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>	-	-
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	-	-
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang	259,206,000	259,206,000
Belanja Modal	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>259,206,000</b>	<b>259,206,000</b>

### B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 0,-** atau mencapai **0 %** dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp. 0,-**.

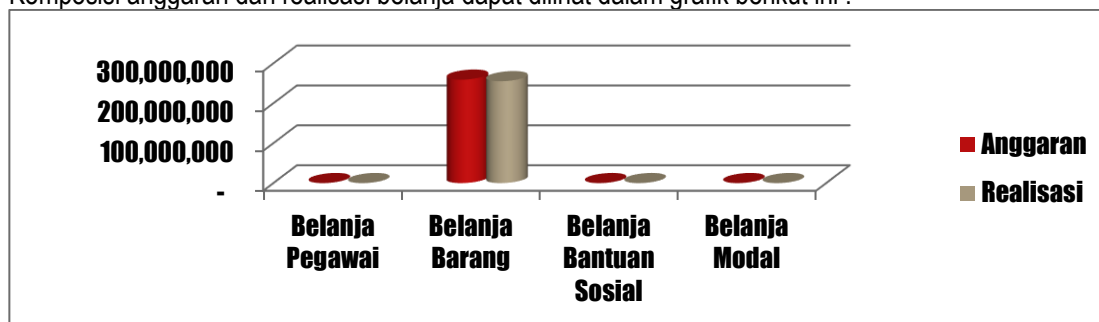
### B.2 BELANJA

Realisasi Belanja instansi pada Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 255.296.870,-** atau **98.49%** dari anggaran belanja sebesar **Rp. 259.206.000,-** Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 tersaji sebagai berikut.

### Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Tahun 2022

Uraian	31-Dec-22		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0	0	0.00
Belanja Barang	259,206,000	255,296,870	98.49
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00
Belanja Modal	0	0	0.00
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>259,206,000</b>	<b>255,296,870</b>	<b>98.49</b>
Pengembalian Belanja	-	-	
<b>Total Belanja</b>	<b>259,206,000</b>	<b>255,296,870</b>	<b>98.49</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi Belanja Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,72% dibandingkan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2021. Hal ini diakibatkan terjadi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan serta optimalisasi anggaran yang turun dibandingkan tahun sebelumnya.

### B.3 BELANJA PEGAWAI

Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia) pada Tahun 2022 tidak memiliki Anggaran Belanja Pegawai. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**.

### B.4 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang T.A. 2022 dan T.A. 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 255.296.870,-** dan **Rp. 266.088.869,-** Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4.06% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021. Hal ini diakibatkan terjadi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan serta optimalisasi anggaran yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

*Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Bahan	88,033,000	112,810,000	(21.96)
Belanja Barang Non Operasional Covid	9,000,000	0	-
Belanja Honor Output Kegiatan	0	2,000,000	(100.00)
Belanja Barang Operasional Covid	5,766,000	0	-
Belanja Jasa Profesi	24,700,000	18,000,000	37.22
Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	-
Belanja Perjalanan Biasa	98,247,870	99,528,869	(1.29)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29,550,000	33,750,000	(12.44)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>255,296,870</b>	<b>266,088,869</b>	<b>(4.06)</b>

### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

#### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 0,-** dan **Rp. 0,-**. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*

Keterangan	31-Dec-22	31-Dec-21
Rekening Bank	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kas sebesar **Rp. 0,-** merupakan Uang Muka dari KPPN untuk keperluan Belanja Operasional.

#### C.2 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** (nihil).

#### C.3 Belanja Dibayar Dimuka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**.

#### C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021 tersaji dibawah ini :

Keterangan	31-Dec-22	31-Dec-21
Persediaan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### C.5 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**.

Keterangan	31-Dec-22	31-Dec-21
Uang Muka dari KPPN	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### C.6 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN.

#### C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

#### D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

##### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**

##### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS).

##### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan

##### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 127.499.000,-** dan **Rp. 132.810.000,-**. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan / atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Des 2022	Pengembalian Belanja	31 Des 2021
Beban Bahan	88,033,000		112,810,000
Beban Barang Operasional Covid	5,766,000		-
Beban Barang Non Operasional Covid	9,000,000		-
Beban Honor Output Kegiatan	-		2,000,000
Beban Jasa Profesi	24,700,000		18,000,000
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	-		-
<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa</b>	<b>127,499,000</b>		<b>132,810,000</b>

##### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

##### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 127.797.870,-** dan **Rp. 133.278.869,-**. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian beban perjalanan dinas untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Des 2022	Pengembalian Belanja	31 Des 2021
Beban Perjalanan Biasa	98,247,870	-	99,528,869
Beban Perjalanan Tetap	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	29,550,000		33,750,000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	-	-	-
<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>127,797,870</b>		<b>133,278,869</b>

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** (Nihil) dan **Rp. 0,-**. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada 31 Desember 2021.

**D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

**D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifat nya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**.

**D.10 Defisit Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp. 0,-** (nihil).

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**,

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar **Rp. (255.296.870),-** dan **Rp. (266.088.869),-**. Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

### E.3 Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan

Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan yaitu penyesuaian Nilai Aset yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**

### E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-** (nihil) diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-** (nihil)

### E.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian aset tetap untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-** (nihil).

### E.6 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 255.296.870,-** dan **Rp. 266.088.869,-**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

### E.7 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

- Terdapat Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen dari Bapak Heriyanto menjadi Bapak Toni Sugiarto.

### F.2 Pengungkapan Lain-Lain

1. Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran  
Nomor Rekening : 8100214087351000  
Nama Rekening : BPG 022 KEMENKUM BDG 408735  
Nama Bank : BSI  
Surat Izin : S-710/WPB.12/KP.05/2021  
Tanggal : 24 Februari 2021
2. Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022  
Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Nomor: W.11-13160.KU.03.03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Nomor W.11-6632.KU.03.03 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Bendahara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat TA 2022, daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022 :  
KPA : Sudjonggo  
PPK : Toni Sugiarto  
Bendahara : Budi Setiawan
3. Di TA 2022 ini terdapat Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid 19 (521131) dengan nilai total sebesar Rp. 5.766.000,- dengan rincian sebagai berikut:  
Berdasarkan SP2D Nomor : 220221701001045 tanggal SP2D 29 Desember 2022 dengan nilai Rp. 5.766.000,- berupa masker, fresh care, kayu putih, hand sanitizer dan disinfektan spray.
4. Di TA 2022 ini terdapat Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19 (521241) dengan nilai total sebesar Rp. 9.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:  
Berdasarkan SP2D Nomor : 220221701000024 tanggal SP2D 16 Maret 2022 dengan nilai Rp. 9.000.000,- berupa biaya pulsa.

### F.3 Temuan dan Tindak Lanjut BPK

-

**LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(dalam rupiah)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013      **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**ESELON I** : 09      **DITJEN HAK ASASI MANUSIA**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 013090200KD      **BA(013) ES1(09) JAWA BARAT**  
**SATUAN KERJA** : 408735      **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG**  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

Kode Lap : LO.SAT  
 Tanggal : 16/01/23 10:10 AM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lo\_satker --SAKTI  
 Tgl Data : 16/01/23 3:23 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	127,499,000	132,810,000	(5,311,000)	(3.999)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	127,797,870	133,278,869	(5,480,999)	(4.112)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	



**LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(dalam rupiah)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013      **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**ESELON I** : 09      **DITJEN HAK ASASI MANUSIA**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 013090200KD      **BA(013) ES1(09) JAWA BARAT**  
**SATUAN KERJA** : 408735      **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG**  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

Kode Lap : LO.SAT  
 Tanggal : 16/01/23 10:10 AM  
 Halaman : 2  
 Prg ID : lap\_lo\_satker --SAKTI  
 Tgl Data : 16/01/23 3:23 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>255,296,870</b>	<b>266,088,869</b>	<b>(10,791,999)</b>	<b>(4.056)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(255,296,870)</b>	<b>(266,088,869)</b>	<b>10,791,999</b>	<b>(4.056)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(255,296,870)</b>	<b>(266,088,869)</b>	<b>10,791,999</b>	<b>(4.056)</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(255,296,870)</b>	<b>(266,088,869)</b>	<b>10,791,999</b>	<b>(4.056)</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 09  
**WILAYAH/PROVINSI** : 0200  
**SATUAN KERJA** : 408735  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**DITJEN HAK ASASI MANUSIA**  
**BA(013) ES1(09) JAWA BARAT**  
**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 16/01/23 10:11 AM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_covid --rekon17  
 Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	5,856,000	5,766,000	0	5,766,000	98.46	90,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	5,856,000	5,766,000	0	5,766,000	98.46	90,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,500,000	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,500,000	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4,356,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	4,356,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5,856,000	14,856,000	14,766,000	0	14,766,000	99.39	90,000
	JUMLAH BELANJA	5,856,000	14,856,000	14,766,000	0	14,766,000	99.39	90,000

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER DESEMBER 2022 DAN 2021**  
**(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 013                      KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
UNIT ORGANISASI    : 09                      DITJEN HAK ASASI MANUSIA  
KDUAPPAW    : 013090200KD BA(013) ES1(09) JAWA BARAT  
KODE SATKER    : 408735                      KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG

*Tgl Data            16/01/23 3:23 AM*  
*Tgl. Cetak 16/01/2023 10:10 AM*  
*lap\_neraca\_satker\_komparatif --rekon17*

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5

<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-------------------------------------	----------	----------	----------	--

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATKER  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(dalam rupiah)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013      **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**ESELON I** : 09      **DITJEN HAK ASASI MANUSIA**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 013090200KD    **BA(013) ES1(09) JAWA BARAT**  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD  
**SATUAN KERJA** : 408735      **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG**

Tgl Data : 16/01/23 3:24 AM  
Kode Lap : LPE.SATKER  
Tanggal : 16/01/23 10:10 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lpe\_satker --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(255,296,870)	(266,088,869)	10,791,999	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	255,296,870	266,088,869	(10,791,999)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	-
EKUITAS AKHIR	0	0	0	-



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013  
**ESELON I** : DITJEN HAK ASASI MANUSIA 09  
**SATUAN KERJA** : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG 408735

Waktu Olap: 2023-01-16 03:21:26.0 [B@6283be19  
 Kode Lap : LRA.F.S  
 Tanggal : 16/01/23 10:10 AM  
 Halaman : 2  
 Prg ID : lap\_lra\_face\_satker\_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>259,206,000</b>	<b>255,296,870</b>	<b>(3,909,130)</b>	<b>98</b>	<b>268,206,000</b>	<b>266,088,869</b>	<b>2,117,131</b>	<b>98</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				0				0

**NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
PER DESEMBER 2022  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
UNIT ORGANISASI : 09  
WILAYAH/PROVINSI : 0200  
SATUAN KERJA : 408735

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DITJEN HAK ASASI MANUSIA  
JAWA BARAT  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG

Tgl Data 16/01/23 3:16 AM  
Tgl. Cetak 16/01/2023 10:10 AM  
lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	255,296,870
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5,766,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	88,033,000	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	9,000,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	24,700,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	98,247,870	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	29,550,000	0
<b>JUMLAH</b>			<b>255,296,870</b>	<b>255,296,870</b>

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
PER DESEMBER 2022  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
UNIT ORGANISASI : 09  
WILAYAH/PROVINSI : 0200  
SATUAN KERJA : 408735

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DITJEN HAK ASASI MANUSIA  
JAWA BARAT  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG

Tgl Data 16/01/23 3:22 AM

Tgl. Cetak 16/01/2023 10:10 AM

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	255,296,870
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5,766,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	88,033,000	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	9,000,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	24,700,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	98,247,870	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29,550,000	0
<b>JUMLAH</b>			<b>255,296,870</b>	<b>255,296,870</b>



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**ESELON I** : 09 **DITJEN HAK ASASI MANUSIA**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 0200 **BA(013) ES1(09) JAWA BARAT**  
**SATUAN KERJA** : 408735 **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG**  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 16/01/23 10:11 AM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun --SAKTI  
 Tgl Data : 16/1/23 3:18 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	5,856,000	5,766,000	0	5,766,000	98.46	90,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	5,856,000	5,766,000	0	5,766,000	98.46	90,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	79,220,000	88,470,000	88,033,000	0	88,033,000	99.51	437,000
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	1,500,000	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	80,720,000	97,470,000	97,033,000	0	97,033,000	99.55	437,000
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	27,200,000	26,700,000	24,700,000	0	24,700,000	92.51	2,000,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4,356,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	31,556,000	26,700,000	24,700,000	0	24,700,000	92.51	2,000,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	98,480,000	98,930,000	98,247,870	0	98,247,870	99.31	682,130
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48,450,000	30,250,000	29,550,000	0	29,550,000	97.69	700,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	146,930,000	129,180,000	127,797,870	0	127,797,870	98.93	1,382,130
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	259,206,000	259,206,000	255,296,870	0	255,296,870	98.49	3,909,130
	JUMLAH BELANJA	259,206,000	259,206,000	255,296,870	0	255,296,870	98.49	3,909,130